

Analisis Dampak Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2015-2017

Ali Akbar Nurisra, Mardiyat Usman, Redi Sunarta*

Program Studi Sarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Abstrak

Dana desa merupakan bentuk konkret upaya pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan daerah pedesaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana desa terhadap kondisi kemiskinan daerah penerima Dana Desa. Data dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kemiskinan dan perkembangan Dana Desa di Pulau Jawa. Sementara, metode analisis kuantitatif yang dipilih adalah Fixed Effect Model untuk mengkaji pengaruh Dana Desa dan beberapa faktor ekonomi sebagai kontrol variabel. Hasil estimasi kami menunjukkan bahwa Program Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, namun efek yang dihasilkan relatif kecil. Peningkatan sebesar satu persen nominal Dana Desa hanya akan mengurangi jumlah orang miskin sebesar 0.002 persen di daerah tersebut—variabel lain tetap. Hal itu mengindikasikan pemanfaatan Dana Desa kurang optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat mesti memberikan perhatian lebih dalam pada perumusan kebijakan dan konsep pembangunan komprehensif untuk mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan.

Kata kunci: Dana Desa; Kemiskinan; Pembangunan Daerah; Pulau Jawa

Kode Klasifikasi JEL: O23; O18; R5.

Pendahuluan

Kemajuan suatu negara tidak lepas dari seberapa jauh pembangunan yang telah berhasil dicapai. Pencapaian pembangunan yang dimaksud tidak hanya dilihat umum, namun perlu memperhatikan aspek-aspek yang lebih spesifik seperti kondisi perubahan politik, sosial, dan budaya pada saat sebelum dan setelah dilakukannya pembangunan. Seringkali pembangunan hanya ditinjau dari perspektif ekonomi saja sedangkan dimensi-dimensi lainnya kerap diabaikan.

Tidaklah mudah bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan dengan keadaan yang beranekaragam. Tentu pembangunan tersebut harus disesuaikan dengan keadaan wilayah dimana pembangunan itu dilaksanakan. Berdasarkan sensus terakhir yang dilakukan, jumlah penduduk di Indonesia telah mencapai 250 juta jiwa lebih. Jumlah sebanyak itu masih memperoleh sebuah keuntungan berupa kekayaan alam melimpah ruah yang terbentang diseluruh nusantara. Hal ini tentu saja menjadi suatu modal yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Sumber daya manusia di Indonesia sangatlah besar dan sumber daya alam yang melimpah normatifnya sangat dibutuhkan demi mendukung keberhasilan pembangunan. Tapi pada kenyataannya, rakyat

* Alamat Korespondensi: Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Kampus UI Depok Kota Depok, Jawa Barat 16424 Telepon : +62 21 7272425, 78886252 (direct) Fax. : +62 21 7863559. E-mail: mardiyat.usman96@gmail.com

Indonesia belum merasa sejahtera meskipun sumber daya alam yang dimiliki bangsa sangat besar. Sepertinya tujuan-tujuan pembangunan belum tercapai dan masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Membicarakan berhasil atau tidaknya suatu pembangunan di suatu negara, seharusnya juga perlu untuk ditinjau seperti apa proses dan *outcome* dalam perspektif kedaerahan atau antardaerah. Sayangnya, perspektif seperti ini seringkali luput dari sorotan para perumus kebijakan. Terlebih jika pembahasan pembangunan dalam perspektif daerah ini lebih mengerucut pada permasalahan pembangunan yang ada di pedesaan.

Desa sebagai unit kesatuan pemerintahan tersendiri yang ada di suatu wilayah seringkali mengalami ketertinggalan pembangunan ketimbang kota. Akses pemberdayaan sumberdaya manusia dalam bentuk sarana pendidikan, pelayanan kesehatan dan sanitasi, serta sarana dan prasarana infrastruktur dasar masih dapat kita lihat jauh sekali dari kondisi ideal di beberapa lokasi. Kondisi yang timpang dengan kota tentu membuat distribusi pendapatan menjadi tidak merata dan mendorong fenomena urbanisasi ke kota-kota terdekat. Padahal sebagaimana kita ketahui desa masih menjadi penyedia sumber tenaga kerja dan juga penyedia kebutuhan pangan, tidak hanya secara regional namun juga dalam skala nasional.

Untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dan pembangunan, pemerintah membentuk skema penyaluran dana yang langsung menargetkan desa sebagai upaya percepatan pembangunan. Kita mengenalnya sebagai Program Dana Desa yang mana sudah terinisiasi dan terlaksana sejak tahun 2015. Dana desa merupakan alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana peruntukannya langsung kepada Desa dan atau Desa Adat. Mekanisme penyalurannya melalui transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana mandat dari pemerintah pusat pada daerah. Pemanfaatan dana ini guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Adanya dana desa ini sesungguhnya merupakan salah satu implementasi dari visi pemerintah pusat yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran.

Berdasarkan pada gambaran kondisi yang dijelaskan diatas, pokok dari penelitian ini secara lebih lanjut akan meneliti bagaimana pemanfaatan dana desa dalam hal pembangunan. Utamanya dari pembangunan tersebut akan spesifik melihat sejauh apa efektifitas dana desa terhadap pengaruh terhadap kemiskinan. Adapun cakupan wilayah yang akan diteliti dipilih Pulau Jawa sebagai area pengamatan.

Tinjauan Literatur

Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) seperti kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya. Saat ini, masalah kemiskinan menjadi lebih kompleks sehingga permasalahan kemiskinan menjadi sebuah masalah yang multidimensional. Kemiskinan dianggap tidak lagi hanya dipahami dari ketidakmampuan ekonomi suatu individu tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi individu atau kelompok dalam menjalani hidup yang lebih bermartabat.

Menurut Sukmaraga (2011:15) penyebab kemiskinan adalah lingkaran kemiskinan yang tidak berujung pangkal. Rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan rendahnya produktivitas kerja. Rendahnya produktivitas berakibat rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada

rendahnya tabungan dan investasi, sehingga akumulasi modal rendah dan berdampak pada terbatasnya lapangan kerja dan berarti meningkatnya jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran yang semakin meningkat menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Badrudin (2012) menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki beberapa jenis sebagai berikut :

1. Kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang terjadi akibat adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga terjadi distribusi yang tidak merata.
2. Kemiskinan absolut, ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bertahan hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diukur menggunakan ukuran kemampuan finansial individu atau kelompok.
3. Kemiskinan struktural, kemiskinan yang terjadi akibat kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan. Maksudnya adalah kondisi struktur atau tatanan kehidupannya tidak hanya menyebabkan kemiskinan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam kondisi struktur atau tatanan kehidupan masyarakat.
4. Kemiskinan kultural, kemiskinan yang terjadi akibat dari faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah yang membelenggu individu tetap melekat dengan indikator kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) menyatakan bahwa individu yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan termasuk kategori penduduk miskin. Garis kemiskinan merupakan indeks kemiskinan

multidimensi yang disusun berdasarkan pada tingkat rumah tangga dan Multidimensional Poverty Index (MPI) dengan memperhitungkan akibat adanya interaksi negatif ketika orang-orang mengalami berbagai kekurangan yang lebih buruk dengan melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi di seluruh negara secara keseluruhan, menghitung rata-ratanya, dan mengkombinasikannya (Todaro et al, 2011).

Menurut World Bank, penduduk miskin adalah individu yang memiliki pengeluaran per hari sebesar US\$2 atau kurang dengan menggunakan metode purchasing power parity (PPP). Saat ini, penduduk yang dianggap miskin di Indonesia adalah individu yang memiliki pengeluaran per hari sebesar US\$1 atau kurang. Namun, indikator garis kemiskinan yang digunakan oleh Indonesia dianggap sebagai klasifikasi penduduk sangat miskin (*extreme poor*) oleh indikator garis kemiskinan World Bank.

Pemerintah Pusat sudah membuat Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia nomor 13 tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan menyatakan bahwa kebijakan atau program dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya menanggulangi kemiskinan adalah dana desa.

Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan

Analisis Dampak Dana Desa Terhadap Kemiskinan Pulau Jawa Tahun 2015-2017

diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Hal itu berarti seluruh sumber pendapatan desa termasuk dana desa yang bersumber dari APBN dapat digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa. Selain itu dalam undang-undang yang sama dijelaskan bahwa dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Mengingat dana desa yang bersumber dari APBN pemerintah pusat dan untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah pusat memiliki wewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kementrian Keuangan (Kemenkeu, 2018: 7) menyatakan dana desa memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dengan tujuan dari dana desa tersebut, maka indeks pembangunan manusia (IPM) dan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB *growth*) di pedesaan juga akan terpengaruh.

Indeks Pembangunan Manusia

Istilah IPM pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan Human Development Report

(HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) IPM memiliki tiga manfaat sebagai berikut:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dalam hal ini penduduk atau masyarakat.
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis yang digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah dan digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum (DAU).

Napitupulu (2007) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Indeks Pembangunan Manusia memiliki indikator komposit dalam penghitungannya antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi per kapita. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan per kapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas

manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah.

Produk Domestik Regional Bruto

Angka-angka Pendapatan Regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator berupa data agregat yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB juga dapat dipakai sebagai bahan evaluasi kegiatan pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun non pemerintah. PDRB juga dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tertentu, dapat menggambarkan struktur ekonominya dan dapat menggambarkan analisisnya terhadap kinerja sektor perekonomian (Mudji et al, 2017).

Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) menyatakan bahwa untuk menghitung angka-angka PDRB terdapat tiga pendekatan yang digunakan sebagai berikut :

1. Pendekatan Produksi PDRB, dimana jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) sebagai berikut : (1) sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, (2) sektor pertambangan dan penggalian, (3) sektor industri pengolahan, (4) sektor listrik, gas, dan air bersih, (5) sektor konstruksi, (6) sektor perdagangan, hotel, dan restoran, (7) sektor pengangkutan dan transportasi, (8) sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, dan (9) sektor jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

2. Pendekatan Pendapatan PDRB, yaitu jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu

(biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran PDRB, dimana semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) pengeluaran konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori, dan (5) ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Menurut Gumilang (2017) pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk pengentasan kemiskinan. Manfaat pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menyebar ke seluruh golongan masyarakat. Selanjutnya teori tersebut dikatakan sebagai teori *Trickle Down* yang dominan dalam teori pembangunan untuk pengentasan kemiskinan. Tujuan dari teori *Trickle Down* adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga mengalir dari kelompok kaya ke kelompok miskin melalui fungsi-fungsi dalam ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat dan berefek *Trickle Down*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan pula diikuti dengan adanya masalah ketimpangan distribusi pendapatan.

Hubungan Kemiskinan dengan Dana Desa

Dana desa merupakan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah pusat sebagai upaya dalam mendorong pembangunan daerah, khususnya pembangunan daerah pedesaan di Indonesia. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN pemerintah pusat dan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara memperbaiki indeks Pembangunan

manusia (IPM) masyarakat pedesaan yang akan berdampak pada pertumbuhan PDRB masyarakat pedesaan sehingga tingkat kemiskinan akan menurun.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permen DPDTT) Nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa menyatakan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa diperuntukan untuk pengadaan, pembangunan, dan pengembangan sarana prasarana di bidang kesehatan masyarakat dan bidang pendidikan dan kebudayaan. Berdasarkan peraturan tersebut penggunaan dana desa salah satunya di prioritaskan untuk memperbaiki sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah pedesaan.

Hubungan Kemiskinan dengan IPM

Todaro et al, (2011) mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan kunci untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas SDM akan mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap pengurangan angka kemiskinan. A. Napitupulu (2007), mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah (Suliswanto, 2010). Sri Wahyudi menyatakan ada pengaruh negatif antara IPM terhadap kemiskinan di Indonesia sebesar 4.59%. Apabila IPM naik sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 4.59%.

Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang dilihat dengan *proxy* Indeks Pembangunan Manusia di suatu provinsi mengindikasikan bahwa provinsi tersebut mampu mengalokasikan belanja daerahnya guna meningkatkan nilai atau kualitas penduduknya. Dengan meningkatnya nilai IPM, maka kualitas penduduk tersebut meningkat dan diiringi juga dengan peningkatan produktivitas. Sehingga ada indikasi kuat bahwa kemiskinan dapat ditekan karena pemenuhan hak-hak dasar seperti pemberdayaan pendidikan dan kesehatan telah mampu di bangun oleh pemerintah daerah tersebut (Sukmaraga & Hayati, 2011).

Setelah kualitas sumber daya manusianya berhasil diperbaiki maka akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia yang dimiliki oleh daerah pedesaan menjadi meningkat juga kualitasnya. Setelah indeks pembangunan manusia yang dimiliki daerah pedesaan meningkat maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB masyarakat pedesaan sehingga tingkat kemiskinan akan menurun di daerah pedesaan. Namun, pertumbuhan PDRB masyarakat pedesaan juga berdampak negatif yang menyebabkan ketimpangan pendapatan individu di pedesaan.

Hubungan Kemiskinan dengan Sektor Pertanian

Sektor pertanian di Indonesia, sampai dengan tahun 2017 kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara keseluruhan mencapai 13,7 persen. Namun sektor ini lah yang justru menyerap tenaga kerja paling banyak ketimbang sektor lainnya. Hingga Agustus 2017 Sebanyak 29,7 persen tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Masalah utama yang harus dihadapi dalam membangun pertanian dan pedesaan adalah produktivitas tenaga kerja dan penguasaan aset produktif yang rendah. Data BPS menunjukkan bahwa kemiskinan di

perdesaan menurun cukup pesat. Namun, kesenjangan antara tingkat kemiskinan perdesaan dan perkotaan melebar. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa sebagian besar masyarakat miskin di perdesaan bekerja di sektor pertanian. Porsi masyarakat miskin di pedesaan telah menurun secara signifikan, tetapi porsi masyarakat miskin di sektor pertanian tidak banyak berubah. Sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan mayoritas masyarakat desa tidak mampu memberikan penghasilan memadai bagi masyarakat miskin dan rentan. Sementara, alternatif penghidupan lain belum muncul atau dikenal.

Todaro et al (2011) berpendapat bahwa kebijakan dalam mengatasi kemiskinan seharusnya lebih diarahkan untuk membangun pedesaan khususnya pada sektor pertanian karena banyaknya jumlah orang miskin yang hidup di kawasan pedesaan. Sesuai dengan hal tersebut, Mubyarto (1983) mengungkapkan bahwa pembangunan pertanian di Indonesia harus diartikan sebagai pembaruan penataan pertanian sebagai upaya mengatasi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung di pedesaan dengan cara memaksimalkan sumber daya utama pembangunan pertanian. (Krisnawati, Suman, & Saputra, 2018).

Peter Timmer telah berkali-kali mengatakan bahwa sektor pertanian sangat potensial untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja pedesaan. Apabila pendapatan petani ikut meningkat sekalipun tingkat harga tidak berubah maka ekonomi pedesaan akan lebih baik, karena tingkat pengeluaran terhadap produk-produk nonfarm juga meningkat. Pembangunan pertanian menjadi landasan utama menuju modernisasi pembangunan ekonomi agar sektor pertanian, industri dan jasa dapat saling bersubstitusi. (Arifin, 2006). Studi-studi terdahulu tentang penanggulangan kemiskinan di Indonesia, seperti

Suryahadi et al. (2009) serta Suryahadi dan Hadiwidjaja (2011), menunjukkan pentingnya transformasi pekerjaan pada upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendidikan dan mekanisasi pertanian agar meningkatkan marginal produktivitas petani.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana desa terhadap perubahan jumlah penduduk miskin. Maka penelitian ini bersifat explanatory, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Kuncoro, 1997). Sampel yang digunakan adalah seluruh kabupaten/kota di Jawa dengan kriteria terdapat penduduk miskin dan menerima Dana Desa. Set Data diperoleh dari kumpulan data sekunder berupa publikasi daring Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan yang dapat bebas diakses oleh publik. Data tersebut terkait dengan variabel nominal Dana Desa dan Jumlah orang miskin per kabupaten/ kota pada periode 2015-2017, variabel lain berfungsi sebagai kontrol variabel.

Tabel 1. Daftar Variabel yang Akan Digunakan

No.	Variabel Penelitian
1	Nominal Dana Desa Per Kab/Kota (Ribu Rupiah)
2	Jumlah Orang Miskin Per Kab/Kota (Ribu Orang)
3	Indeks Pembangunan Manusia (0 – 100)
4	PDRB Sektor Pertanian (Miliar Rupiah)
5	Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan 2010 (%)

Analisis Dampak Dana Desa Terhadap Kemiskinan Pulau Jawa Tahun 2015-2017

Data dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kemiskinan dan perkembangan Dana Desa di Pulau Jawa. Sementara, metode analisis kuantitatif digunakan untuk mengkaji pengaruh Dana Desa dan beberapa faktor ekonomi sebagai kontrol terhadap jumlah orang miskin di kabupaten/kota tersebut. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah model regresi panel data untuk mengidentifikasi dan mengukur efek sederhana yang tidak dapat diatasi dalam data cross section atau time series saja (Firdaus, 2011).

Teknik analisis regresi yang digunakan adalah dengan model *double log* untuk mengukur elastisitas unit dan juga sebagai normalisasi distribusi data. Sementara, perumusan model disusun berdasarkan beberapa studi literatur yang membahas determinan kemiskinan. Antara lain, studi tentang dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan (Siregar & Wahyuniarti, 2007; Suryahadi, Suryadarma, & Sumarto, 2009); Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan (Kristianto & I, 2017; Subanidja & Suharto, 2013; Sudarlan, 2015); Dan analisis sektor pertanian terhadap penurunankemiskinan (Hermawan, 2015; Satrio, 2018).

Berikut spesifikasi model regresi panel yang digunakan:

$$\ln POVi_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln DD_{it} + \beta_2 \ln IPMi_{it} + \beta_3 \ln TANI_{it} + \beta_4 GROWTH_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana : $POVi_{it}$ adalah Jumlah penduduk miskin kabupaten/kota-i tahun ke-t. DD_{it} adalah Jumlah Dana Desa kabupaten/kota-i tahun ke-t; $IPMi_{it}$ adalah Indeks pembangunan manusia kabupaten/kota -i tahun ke-t; $TANI_{it}$ adalah PDRB sektor usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan kabupaten/kota -i tahun ke-t;

$GROWTH_{it}$ adalah laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota -i tahun ke-t.

Ada tiga pendekatan dalam mengestimasi data panel, yaitu *Pooled Least Square* (PLS) , *Fixed Effects Model* (FEM) , dan *Random Effects Model* (REM) (Gujarati, 2004). PLS hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* tanpa melihat perbedaan antarwaktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa metode estimasi model ini sama dengan metode OLS. FEM ini mengasumsikan bahwa perbedaan antarindividu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya, namun slope antarindividu sama. Model FEM digunakan untuk melihat dampak dari variabel-variabel *time-variant* terhadap dependen variabel. Terakhir, pendekatan REM yang mengasumsikan setiap individu mempunyai perbedaan intersep yang bersifat stokastik. Model ini sangat berguna jika individu yang merepresentasikan populasi diambil secara acak.

Model terbaik bisa ditentukan melalui uji ekonometrika yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji LM Breush-Pagan. Pertama kita lakukan Uji Hausman untuk memilih model yang terbaik antara Fixed Effect Model dengan Random Effect Model. Berdasarkan hasil pengujian Hausman diketahui bahwa $\chi^2()$ sebesar 81.64 atau probabilitas *Cross-section* random sebesar 0.000, maka dengan alpha 5% kita tolak nol hipotesis tes tersebut. Sehingga dapat diputuskan model yang dipilih adalah menggunakan Fixed Effect. Selanjutnya, Uji statistik Chow dilakukan untuk memilih antara model Pooled Least Square atau Fixed Effect Model. Hasil dari uji statistik Chow diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.00. Maka dengan alpha 5%, kita menolak hipotesis untuk menggunakan model Pooled Least Square. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan model Fixed Effect.

Tabel 2. Perkembangan Dana Desa dan Penduduk Miskin per Provinsi Tahun 2015 - 2017

No.	Provinsi	Dana Desa (Ribuan Rupiah)			Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Jawa Barat	1,064,203,516.00	3,568,437,985.00	4,547,513,838.00	4,485.65	4,168.11	3,774.41
2	Jawa Tengah	1,065,688,724.00	5,002,426,341.00	6,384,442,058.00	4,505.78	4,493.75	4,197.49
3	Jawa Timur	1,161,076,913.00	4,969,123,651.00	6,339,556,181.00	4,775.97	4,638.53	4,405.27
4	D.I Yogyakarta	112,682,888.00	287,695,629.00	368,567,559.00	485.56	488.83	466.33
5	Banten	200,985,514.00	791,252,019.00	1,009,506,961.00	690.67	657.74	699.83

Hasil dan Analisis

Deskripsi Jumlah Orang Miskin di Pulau Jawa

Pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Sedangkan untuk provinsi D.I Yogyakarta mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 3270 orang. Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten menjadi provinsi dengan penurunan jumlah penduduk miskin paling signifikan dengan penurunan masing – masing 7% dan 5%.

Pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan D.I Yogyakarta. Sedangkan untuk provinsi Banten mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin di tahun 2017 sebanyak 42.090 orang. Secara rata-rata Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengalami penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 6%. Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi yang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin paling tinggi dengan penurunan masing – masing 9% dan 7% dari tahun sebelumnya.

Alokasi Dana Desa (DD) di Pulau Jawa

Pemerintah pusat yang berkomitmen memberikan kebebasan kepada pemerintah desa guna kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan penduduk pedesaan. Berdasarkan Tabel 2. dapat dilihat terjadi peningkatan anggaran dana desa dari setiap provinsi yang ada di pulau jawa dari tahun 2015 hingga 2017. Peningkatan anggaran dana desa signifikan terjadi di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta dan Banten di tahun 2016. Dengan persentase masing-masing 235.32%, 369.41%, 327.98%, 155.31%, 293.69%. Peningkatan sangat dratis tersebut tidak lepas dari keputusan penganggaran Pemerintah Pusat yang meningkatkan alokasi Dana Desa dari Rp9 Triliun menjadi Rp50 Triliun di tahun 2016 atau meningkat sebesar 451.3% (YoY).

Sedangkan untuk tahun 2017, dana desa kembali meningkat, namun tidak secara signifikan seperti yang terjadi tahun sebelumnya. Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp60 Triliun untuk semua provinsi. Walaupun begitu peningkatan yang terjadi masih cukup besar dimana secara rata-rata provinsi di Pulau Jawa mendapatkan kenaikan nominal Dana Desa sebanyak 28%.

Analisis Dampak Dana Desa Terhadap Kemiskinan Pulau Jawa Tahun 2015-2017

Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mengalami peningkatan anggaran dana desa secara signifikan pada tahun 2016 dan 2017 terjadi di Kabupaten Bogor, Garut, dan Cirebon. Untuk kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami peningkatan anggaran dana desa secara signifikan pada tahun 2016 dan 2017 terjadi di Kabupaten Kebumen, Pati, dan Purworejo. Sedangkan kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mengalami peningkatan anggaran dana desa secara signifikan pada tahun 2016 dan 2017 terjadi di Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, dan Malang. Peningkatan anggaran tidak lepas dari jumlah desa yang berada di kabupaten/kota tersebut.

Hasil Estimasi Model

$$\ln POV_{it} = 13.1647 - 0.0019 \ln DD_{it} \\ - 1.2507 \ln IPM_{it} - 0.3535 \ln TANI_{it} \\ - 0.0002 GROWTH_{it}$$

Fixed Effect Model sudah dipilih sebagai pendekatan yang akan dilakukan. Namun, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam persamaan regresi agar estimasi *Best Linier Unbiased Estimate* (BLUE). Maka dilakukan beberapa uji statistik untuk melihat terdapat pelanggaran pada asumsi klasik. Pertama semua residual atau *error* harus mempunyai varian yang sama, homoskedastis. Sedangkan bila varian berubah-ubah disebut heteroskedastisitas. Kita dapat melakukan Wald Test, NCV Test atau Breush Pagan Test untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas. Dari hasil Wald test, diketahui bahwa terdapat heteroskedastisitas dalam spesifikasi model yang telah dibuat.

Kedua, kita harus menguji apakah terdapat keterkaitan antar residual atau *error*. Kita bisa uji otokorelasi di data panel menggunakan Wooldridge Test. Dari hasil Wooldridge Test menunjukkan bahwa terdapat otokorelasi antar

residual. Oleh karena itu, model yang digunakan memiliki masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi, jadi harus dilakukan modifikasi model dahulu. Pelanggaran dua asumsi klasik diatas dapat diatasi dengan pendekatan *cluster-robust standard errors*. Dan menunjukan hasil estimasi lebih efisien dari sebelumnya.

Hasil uji-F untuk menguji goodness-fit model yang sudah diperbaiki juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 39.48, maka dengan alpha 5% kita bisa menolak nol Hipotesis Uji-F. Dengan kata lain, secara bersamaan variabel bebas yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap jumlah orang miskin penerima Dana Desa di Pulau Jawa. Disisi lain, dari hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien determinasi (*R-squared*) sebesar 0.5332 artinya bahwa 53.32% variasi jumlah orang miskin dapat dijelaskan oleh variabel yang sudah kita dipilih. Disisi lain, sisanya sebesar 46.68% variabel kemiskinan bisa dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

Sementara untuk mengetahui variabel dependen dipengaruhi secara parsial oleh independen variabel kita dapat menggunakan uji-t. Hasil pengujian t-statistik dengan alpha 5% menunjukkan bahwa variabel Dana Desa secara signifikan memengaruhi jumlah orang miskin Kabupaten/Kota di Pulau Jawa penerima program. Jika terjadi peningkatan sebesar satu persen nominal Dana Desa, maka akan mengurangi jumlah orang miskin sebesar 0.002 persen di daerah tersebut—*ceteris paribus*.

Sedangkan, dari ketiga variabel kontrol yang digunakan, hasil pengujian t-statistik dengan alpha 5% menyatakan bahwa hanya variabel laju pertumbuhan ekonomi saja yang tidak secara signifikan memengaruhi jumlah orang miskin (Tabel 6.). Hal tersebut mengindikasikan

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Relatif Alokasi Dana Desa dan Penduduk Miskin

No.	Provinsi	Porsi Dana Desa (%)			Porsi Penduduk Miskin (%)		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Jawa Barat	11.74	7.14	7.58	15.73	15.01	14.20
2	Jawa Tengah	11.75	10.01	10.64	15.80	16.19	15.79
3	Jawa Timur	12.81	9.94	10.57	16.75	16.71	16.57
4	D.I Yogyakarta	1.24	0.58	0.61	1.70	1.76	1.75
5	Banten	2.22	1.58	1.68	2.42	2.37	2.63

pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada periode 2015-2017 belum memberikan manfaat secara signifikan bagi orang miskin di daerah penelitian ini.

Dana Desa dan Kemiskinan

Sejauh ini, pemanfaatan Dana Desa berfokus pada pembangunan fisik—84% digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan, sedangkan hanya 6.5% untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sisanya untuk kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan (World Bank, 2015). Pemerintah desa masih tertuju pada pemenuhan kebutuhan fasilitas/infrastruktur dasar yang hasilnya dapat dirasakan seluruh warga desa (SMERU Research Institute, 2018). Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan peningkatan kapasitas, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan serta usaha ekonomi desa masih sangat terbatas.

Pembangunan infrastruktur diharapkan akan menyerap tenaga kerja, sekaligus membangkitkan ekonomi desa. Akan tetapi, belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama penyerapan tenaga kerja dari kelompok miskin. Fenomena tersebut nampak tidak sesuai tujuan pembangunan desa yang tercantum di Pasal 78 UUD Desa. Hasil

estimasi kami yang menunjukkan bahwa Program Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, namun efek yang dihasilkan relatif sangat kecil.

Selain pemanfaatan Dana Desa yang kurang optimal, formula alokasi 90:10 juga tidak relevan untuk dilanjutkan jika memang distribusi Dana Desa ditujukan untuk membantu masyarakat miskin keluar dari garis kemiskinan karena mengabaikan heterogenitas desa-desa di Indonesia (Handra et al., 2017). Desa-desa yang berukuran besar di mana jumlah orang miskin hidup juga besar, menerima dana desa relatif sama besarnya dengan desa yang lebih kecil. Sebanyak 34% atau 27 juta penduduk miskin atau hampir miskin tinggal di 10% desa dengan Dana Desa per kapita terendah (World Bank, 2015).

Secara keseluruhan, tidak ada persentase alokasi Dana Desa melebihi porsi jumlah miskin di Pulau Jawa. Pulau Jawa mendapatkan dana desa jauh di bawah proporsi penduduk miskin dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Provinsi Jawa Barat memiliki selisih persentase paling besar dua tahun terakhir dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Selisih dari kelima provinsi tersebut makin lama semakin besar *gap* yang terjadi. Oleh karena itu, distribusi Dana Desa kurang

proporsional untuk mengurangi jumlah penduduk miskin secara masif.

Kesimpulan

Kemiskinan merupakan persoalan yang bersifat kompleks dan multidimensi, oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah untuk mengatasi atau menanggulangnya. Dana desa merupakan sebuah program pemerintah pusat dengan salah satu tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan. Selain itu, dana desa juga menjadi salah satu upaya dari pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan di daerah pedesaan.

Sejauh ini, pemanfaatan dana desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan peningkatan kapasitas, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan serta usaha ekonomi desa masih sangat terbatas. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa Dana Desa secara signifikan mengurangi jumlah orang miskin di kabupaten/kota di Pulau Jawa penerima program, namun efeknya relatif kecil. Hal itu mengindikasikan pemanfaatan Dana Desa kurang optimal dan juga alokasi distribusi Dana Desa kurang proporsional jika tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat mesti memberikan perhatian lebih dalam pada perumusan kebijakan dan konsep pembangunan yang komprehensif.

Daftar Pustaka

- Arifin, B. (2006). Pemikiran Untuk Mengeluarkan Petani Dari Kemiskinan. *Jurnal Pangan*, XV(46), 3-14.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. Konsep Indeks Pembangunan Manusia. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>. Di akses pada 6 April 2019.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. Konsep Kemiskinan dan Ketimpangan. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>. Di akses pada 6 April 2019.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. Metode Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). <https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html>. Di akses pada 6 April 2019.
- Badrudin, Rudi. 2012. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Firdaus, M. (2011). *Aplikasi ekonometrika untuk data panel dan time series*. Bogor: Bogor: IPB Press.
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometrics* (4th editio). New York: The McGraw-Hill Companies.
- Gumilang, Muhammad Fajar. 2017. Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bogor. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Hermawan, I. (2015). Analisis Eksistensi Sektor Pertanian terhadap Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan, 28(2), 135–144.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). 2018. *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*.
- Krisnawati, E., Suman, A., & Saputra, P. M. (2018, Maret). Kajian Pengaruh Program Nasional Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi Terhadap Kemiskinan Perdesaan Di Wilayah Barat dan Timur Indonesia. *JIEP*, 18(1), 15-34.
- Kristianto, D., & I, B. P. (2017). *Pengaruh Jumlah Penduduk , IPM , dan TPT terhadap Kemiskinan (Pendekatan Moneter dan Multidimensi) di Indonesia*. Jakarta.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan* (1st ed.). Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan PN.
- Mubyarto, 1983, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Edisi Ketiga, LP3ES .Yogyakarta.
- Mudji, Arthi dan Taripar, Willstar. 2017. Analisa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang. *Jurnal Pangripta*. 1(1): 35-36.
- Napitupulu, Apriliyah S. 2007. Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara. Skripsi. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permen DPDTT) Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Satrio, I. (2018). Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. *Agriekonomika*, 7(2), 188–196. <https://doi.org/http://doi.org/10.21107/agriekonomika.v7i2.4707> ABSTRAK

Analisis Dampak Dana Desa Terhadap Kemiskinan Pulau Jawa Tahun 2015-2017

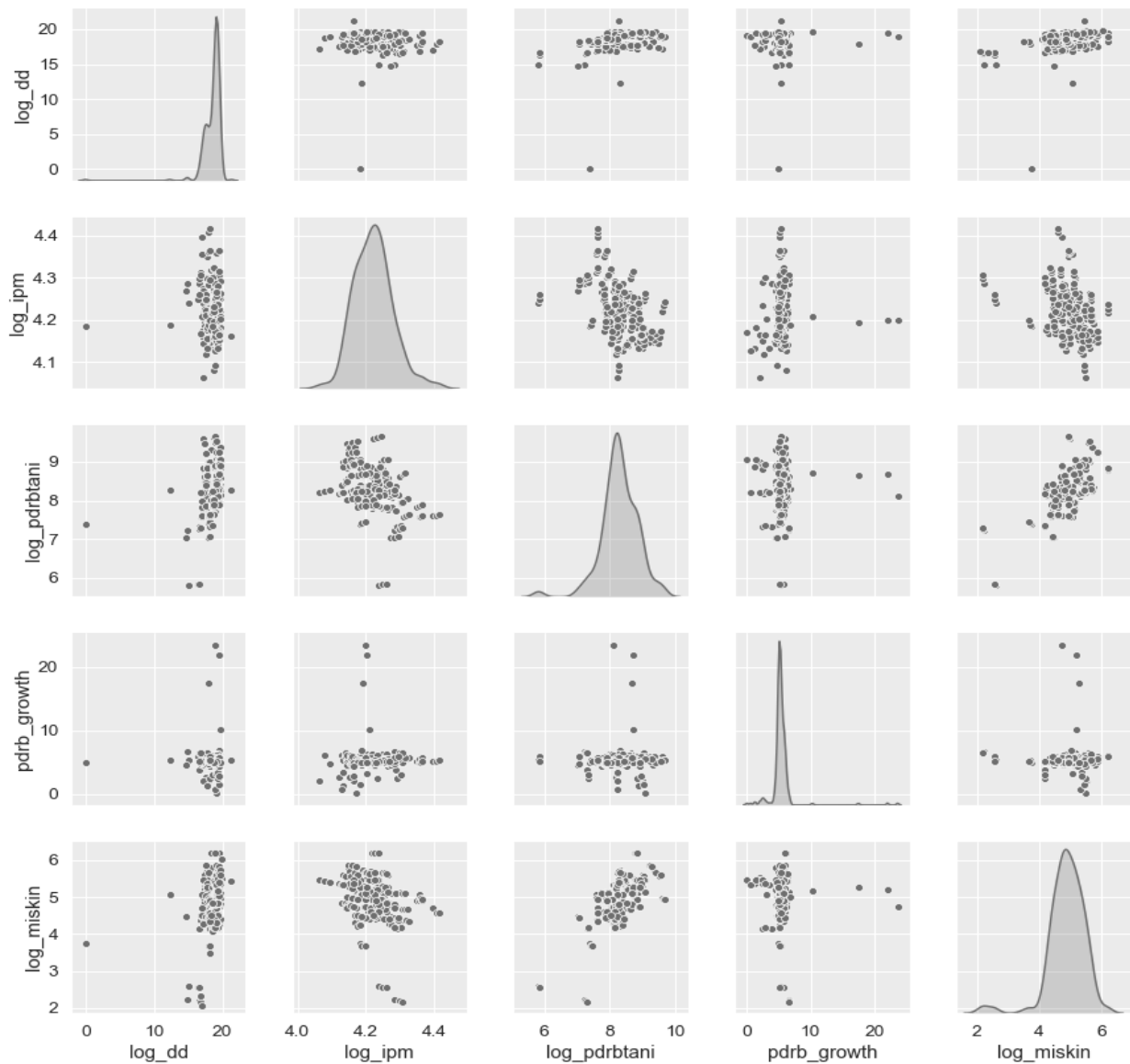
- Siregar, H., & Wahyuniarti, D. (2007). Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. *Jurnal Institut Pertanian Bogor*, 24–40.
- Subanidja, S., & Suharto, E. (2013). The Dominant factors in The Causes of Poverty Level in Indonesia. *International Journal of Arts & Sciences (IJAS)*, 68–76.
- Sudarlan. (2015). Contribution Of Human Development Index On Per Capita Income Growth And Poverty Alleviation In Indonesia. *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 4(8), 4–9.
- Sukmaraga, Prima. 2011. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Handra, H., Sidik, M., Satria, S., Suhirman, Murniasih, E., Suryani, D., & Robertson, D. (2017). *Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.
- SMERU Research Institute. (2018). *Pemanfaatan Dana Desa*. Jakarta.
- Sukmaraga, P., & Hayati, B. (2011). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah. Universitas Diponegoro.
- Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh produk domestik bruto (pdb) dan indeks pembangunan manusia (ipm) terhadap angka kemiskinan di indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 357–366.
- Suryahadi, A., and G. Hadiwidjaja. 2012. The Role of Agriculture in Poverty Reduction in Indonesia. SMERU Research Institute, Jakarta – Indonesia. 25 pp.
- Suryahadi, A., Suryadarma, D., & Sumarto, S. (2009). The effects of location and sectoral components of economic growth on poverty: Evidence from Indonesia. *Journal of Development Economics*, 89(1), 109-117.
- World Bank. (2015). *Indonesia Economic Quaterly, December 2015*.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi 11. Jakarta: Erlangga.
- Republik Indonesia. 2014. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Lampiran

Tabel 4. Deskripsi Statistik Masing - Masing Variabel

	miskin	danadesa	pdrb_tani	ipm	pdrb_growth
count	252.000000	2.520000e+02	252.000000	252.000000	252.000000
mean	156.188135	1.482487e+08	4657.302817	68.318097	5.418651
std	77.482281	1.382599e+08	2567.924541	3.920843	1.978051
min	8.770000	1.000000e+00	331.330000	58.180000	0.080000
25%	102.930000	4.996784e+07	3062.472500	65.520000	5.037500
50%	141.000000	1.440039e+08	3936.815000	68.115000	5.295000
75%	196.222500	2.128129e+08	5794.902500	70.447500	5.712500
max	490.800000	1.745276e+09	15612.160000	82.850000	23.530000

Grafik 1. Pairplot Antarvariabel



Tabel 5. Hasil Uji-Hausman

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
	(b) FEM	(B) REM		
log_dd	-.0018531	-.0032515	.0013984	.
log_ipm	-1.250667	-2.551227	1.30056	.1202916
log_pdrbtani	-.3534706	.1964157	-.5498862	.0587506
pdrb_growth	-.0002256	-.0006626	.0004371	.

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
 B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
 = 81.64
 Prob>chi2 = 0.0000
 (V_b-V_B is not positive definite)

Persamaan 1. Hasil Uji-Chow

F test that all u_i=0: F(83, 164) = 1110.15
 Prob > F = 0.0000

Persamaan 2. Hasil Wald Test

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
 in fixed effect regression model

H0: $\sigma(i)^2 = \sigma^2$ for all i

chi2 (84) = 33419.21
 Prob>chi2 = 0.0000

Persamaan 3. Hasil Woolridge Test

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

H0: no first-order autocorrelation

F(1, 83) = 71.387
 Prob > F = 0.0000

Tabel 6. Hasil Estimasi Akhir Fixed Effect Model

```

Fixed-effects (within) regression          Number of obs   =       252
Group variable: code                     Number of groups =       84

R-sq:                                     Obs per group:
    within = 0.5332                        min =           3
    between = 0.4138                       avg =          3.0
    overall = 0.4044                       max =           3

corr(u_i, Xb) = -0.7740                    F(4,83)          =      39.48
                                           Prob > F         =      0.0000

```

(Std. Err. adjusted for 84 clusters in code)

log_miskin	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
log_dd	-.0018531	.000557	-3.33	0.001	-.0029608	-.0007453
log_ipm	-1.250667	.2815826	-4.44	0.000	-1.810723	-.6906102
log_pdrbtani	-.3534706	.0896656	-3.94	0.000	-.5318119	-.1751293
pdrb_growth	-.0002256	.00049	-0.46	0.646	-.0012001	.000749
_cons	13.16466	.9056449	14.54	0.000	11.36337	14.96595
sigma_u	.72400885					
sigma_e	.02176186					
rho	.99909736	(fraction of variance due to u_i)				